

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUMAJANG
NOMOR : 5 TAHUN 2018
TENTANG : RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018-2033

**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN LUMAJANG
TAHUN 2018 - 2033**

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

- Bagian - A : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN**
- Bagian - B : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN**
- Bagian - C : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN**
- Bagian - D : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN**

Bagian – A : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KABUPATEN

1. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DPK

Arah Kebijakan 1 : Perencanaan Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan DPK, KSPK dan KPPK	a. Penyusunan dan pembuatan rencana induk pembangunan DPK yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. DPK Senduro dan sekitarnya; 2. DPK Pronojiwo dan sekitarnya; 3. DPK Klakah-Kedungjajang dan sekitarnya; 4. DPK Pasirian-Tempursari dan sekitarnya; 5. DPK Yosowilangun dan sekitarnya; 6. DPK Sumpoko-Tempeh dan sekitarnya; 7. DPK Gucialit dan sekitarnya; dan 8. DPK Jatiroto-Randuagung dan sekitarnya. 				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Kehutanan dan Kepariwisata

		<p>b. Penyusunan dan pembuatan rencana detail pembangunan KSPK yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPK Puncak B-29 Argosari dan sekitarnya; 2. KSPK Ranu Pane dan sekitarnya; 3. KSPK Sidomulyo dan sekitarnya; 4. KSPK Papringan dan sekitarnya; 5. KSPK Dampar dan sekitarnya; 6. KSPK Bulurejo dan sekitarnya; 7. KSPK Wotgalih dan sekitarnya; 8. KSPK Petahunan-Pulo-Jakarta dan sekitarnya; 9. KSPK Kertowono dan sekitarnya; 10. KSPK Ranuworong dan sekitarnya; dan 11. KSPK Jatiroto dan sekitarnya. <p>c. Penyusunan dan pembuatan rencana detail pembangunan KPPK yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPPK Pura Mandaragiri Semeru Agung dan sekitarnya; 2. KPPK Air Terjun Manggis dan sekitarnya; 3. KPPK Air Terjun Antrukon dan sekitarnya; 4. KPPK Piket Nol dan sekitarnya; 5. KPPK Ranu Klakah-Pakis dan sekitarnya; 6. KPPK KWT (<i>Water Park</i>) dan sekitarnya; 7. KPPK Rowo Danurojo dan sekitarnya; 8. KPPK Pantai Bambang dan sekitarnya; 9. KPPK Pemandian Telaga Semeru dan sekitarnya; 10. KPPK Pantai Watu Pecak dan sekitarnya; 11. KPPK Panorama Gunung Tambuh dan sekitarnya; 12. KPPK Pemandian Alkautsar dan sekitarnya; 13. KPPK Pantai Translog dan sekitarnya; 14. KPPK Wisata Agro Kebun The dan sekitarnya; 15. KPPK Air Terjun Semingkir dan sekitarnya; dan 16. KPPK Candi Agung dan sekitarnya. 				
2	Menyusun regulasi tata bangunan dan	a. Penyusunan dan pembuatan rencana tata bangunan dan				Organisasi Perangkat

	tata lingkungan DPK, KSPK dan KPPK	lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di DPK, KSPK dan KPPK				Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Kehutanan dan Kepariwisata
--	------------------------------------	---	--	--	--	---

Arah Kebijakan 2: Implementasi Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Menyusun indikasi program pembangunan kepariwisataan Kabupaten Lumajang	a. Penyusunan indikasi program pembangunan DPK, KSPK dan KPPK secara sistematis dan integratif				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Kehutanan dan Kepariwisata

Arah Kebijakan 3: Pengendalian Implementasi Pembangunan DPK, KSPK dan KPPK

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Menegakkan regulasi pembangunan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan rencana detail DPK, KSPK dan KPPK	a. Penyiapan peraturan rencana induk pembangunan DPK				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Hukum dan Kepariwisata
		b. Penyiapan peraturan rencana detail KSPK dan KPPK				
		c. Penerapan peraturan rencana induk pembangunan DPK				
		d. Penerapan peraturan rencana detail KSPK dan KPPK				

2	Meningkatkan koordinasi antara SKPD, pelaku usaha dan masyarakat	a. Penyebarluasan informasi dan publikasi peraturan tentang DPK, KSPK dan KPPK				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kepariwisata
		b. Penyusunan standard penyebaran informasi dan publikasi peraturan tentang DPK, KSPK, dan KPPK kepada masyarakat luas dan pelaku usaha pariwisata				

2. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA

Arah Kebijakan 1 : Perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan Daerah

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan daya tarik wisata baru di berbagai kawasan pariwisata yang belum berkembang	a. Ranu Klakah, Ranu Pakis, KWT (Water Park), Pantai Bambang, Taman Wisata TPI Tempursari, Puncak B29 Argosari, Ranu Kumbolo, Pendakian Puncak Semeru dan Pemandian Alam Selokambang				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Kehutanan, Lingkungan, kelautan dan Kepariwisata
		b. Wisata Agro PG Jatiroto, Pemandian Joyokarto, <i>Water Boom</i> , Pantai Watu Pecak, Hutan Bambu, Goa Tetes, Air Terjun Grojogan Sewu, Pantai Watu Godheg, Pantai Watu Gedeg, Pura Mandala Giri Semeru Agung, Ranu Pane, Ranu Regulo, Pantai Wotgalih, Alun-alun Kota dan Agro Royal Family Park				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Kehutanan, Lingkungan, Kelautan dan Kepariwisata
		c. Ranu Bedali, Gunung Fuji, Gunung Lamongan, Ranu Lading, Ranu Glebeg, Candi Agung, Rowo Danurojo, Pantai Parupa, Kolam Renang Kayu Batu, Pantai Translog, Pantai Dampar, Pantai Tlepuk, Pantai Ciut, Pemandian Telaga Semeru, Goa				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		Bima, Goa Lowo, Goa Terowongan, Pemandian Minasari, Gunung Tambu, Pemandian Tirtosari, Pemandian Tirtowono, Gunung Sawur, Candi Gedong Putri, Gladak Perak, Piket Nol, Ranu Darungan, Jembatan Gantung Rowobaung, Pantai Bulu, Pemandian Umbulan, Pantai Bantengan, Loji Tawon Songo, Watu Klosot, Gedung Goa, Air Terjun Kedung Kuwung, Ranu Kuning, Pemandian Rowo Kancu, Air Terjun Antrukon, Pura Rondo Kuning, Air Terjun Manggis, Air Terjun Sari Kemuning, Air Terjun Sobyok, Agro Kebun Teh Kertowono, Air Terjun Semingkir, Air Terjun Pawon, Kolam Renang Veteran, Situs Biting, Makam Minak Koncar, Makam Patih Lohgender, Makam Kencana Wungu, Pantai Maleman, Pemandian AL-Kautsar, Makam Mbah Drajid, Makam Rowo Suwono, Pemancingan Rowosumo, Pemandian Batu Kambang, Pemandian Surojoyo, dan Pemandian Tirta Ade Rahman				Pembangunan, Kehutanan, Lingkungan, Kelautan dan Kepariwisata
		d. Perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di destinasi pariwisata Kabupaten dan kawasan pariwisata yang belum berkembang.				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Pekerjaan Umum dan Kepariwisata

Arah Kebijakan 2 : Pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mendorong perkembangan destinasi pariwisata	a. Inovasi produk dalam meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/buatan yang sedang berkembang				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Pemberdayaan Masyarakat dan Pekerjaan Umum
		b. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi daya tarik wisata				
		c. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata				
2	Memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata	a. Pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan, pegunungan dan budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Lingkungan Hidup, dan Kehutanan
		b. Pengawasan pembangunan sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik di lokasi daya tarik wisata				

Arah Kebijakan 3 : Pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait	<p>a. Pengembangan jenis daya tarik wisata dengan berbagai tema yang saling melengkapi, mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Wisata Ranu: Ranu Klakah, Ranu Pakis, Ranu Kumbolo, Ranu Pane, Ranu Regulo, Ranu Bedali, Ranu Lading, Ranu Glebeg, Ranu Darungan, Ranu Kuning - Pengembangan Wisata Bahari: Pantai Bambang, Pantai Watu Pecak, Pantai Watu Godheg, Pantai Watu Gedeg, Pantai Parupa, Pantai Translog, Pantai Dampar, Pantai Tlepuh, Pantai Ciut, Pantai Bulu, dan Pantai Bantengan. - Pengembangan Wisata Petualangan/Ekspedisi: Puncak B29 Argosari, Pendakian Puncak Semeru, Gunung Lamongan, Gunung Tambu, dan Gunung Sawur - Pengembangan Wisata Tirta: KWT (Water Park), Taman Wisata TPI Tempursari, Pemandian Alam Selokambang, Pemandian Joyokarto, Kolam Renang Kayu Batu, Pemandian Telaga Semeru, Pemandian Minasari, Pemandian Tirtosari, Pemandian Tirtowono, Pemandian Umbulan, Pemandian Rowo Kancu, Kolam Renang Veteran, Pemandian AL-Kautsar, Pemandian Batu Kambang, Pemandian Surojoyo, dan Pemandian Tirta Ade Rahman - Pengembangan Wisata Coban: Air Terjun Grojogan Sewu, Air Terjun Kedung Kuwung, Air Terjun Antrukun, Air Terjun Manggis, Air Terjun Sari Kemuning, Air Terjun Sobyok, Air Terjun Semingkir, dan Air Terjun Pawon. 				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Lingkungan Hidup, kehutanan, Kelautan dan Kepariwisata

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		b. Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana umum di sekitar lokasi daya tarik wisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pekerjaan Umum, Perencanaan Pembangunan dan Kepariwisata

Arah Kebijakan 4 : Revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk DPK

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Melaksanakan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata, dan	<p>a. Inovasi manajemen daya tarik wisata dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan di daya tarik wisata</p> <p>b. Pengembangan program-program interpretasi dan atraksi/aktivitas wisata di daya tarik wisata termasuk yang berbasis teknologi</p> <p>c. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks lokal (kabupaten/kota), regional (provinsi), dan nasional.</p> <p>d. Peningkatan kualitas dan pembangunan kelengkapan sarana prasarana umum untuk kenyamanan wisatawan di sekitar lokasi daya tarik wisata</p>				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kelautan dan Kepariwisata

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2	Memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan di sekitarnya	a. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perencanaan Pembangunan, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kelautan dan Kepariwisata
		b. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.				
		c. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutandan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.				
		d. Peningkatan pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata				

3. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA

Arah Kebijakan 1 : Pengembangan kemudahan akses bagi wisatawan menuju DPK

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan	a. Fasilitasi ketersediaan angkutan moda transportasi lokal ke dan di DPK				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan dan Kepariwisata
2	Mengembangkan kapasitas angkutan moda transportasi menuju DPK	a. Pengembangan kapasitas angkutan moda transportasi lokal ke dan di DPK				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan dan Kepariwisata
3	Mengembangkan keragaman jenis moda transportasi menuju DPK	a. Pengembangan keragaman jenis moda transportasi lokal ke dan di DPK dan lokasi daya tarik wisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan dan Kepariwisata

Arah Kebijakan 2 : Pengembangan kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan menuju DPK

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan kenyamanan dan keamanan moda transportasi menuju DPK	a. Peningkatan kenyamanan dan keamanan moda transportasi lokal ke dan di DPK, termasuk penambahan dan pembenahan rambu-rambu menuju DPK dan lokasi daya tarik wisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan dan Kepariwisata

Arah Kebijakan 3 : Pengembangan kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju DPK

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Menyediakan sarana dan prasarana pergerakan moda transportasi bagi wisatawan di DPK	a. Pengembangan ketersediaan sarana dan prasarana simpul pergerakan moda transportasi (pusat distribusi dan pintu gerbang transportasi angkutan jalan) pada DPK				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan, Perencanaan Pembangunan, Pekerjaan Umum, dan Kepariwisata
		b. Pengembangan sarana jalan menuju DPK dan lokasi daya tarik wisata				
		c. Pengembangan terminal dan stasiun sebagai akses DPK Lumajang				
		d. Pembangunan <i>rest area</i> sebagai sarana untuk transit bagi kendaraan-kendaraan besar				
		e. Pemanfaatan transportasi lokal untuk sarana pergerakan wisatawan ke DPK				

Arah Kebijakan 4 : Pengembangan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Membangun dan mengembangkan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPK	a. Pengembangan sistem jaringan transportasi lokal dan pelayanan terpadu multimoda di Destinasi Pariwisata Kabupaten.				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan dan Kepariwisata

Arah Kebijakan 5 : Pengembangan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda dari pintu gerbang wisata ke DPK	a. Pengembangan ketersediaan informasi rute dan jadwal operasi moda transportasi berbagai jenis moda transportasi lokal berbasis teknologi informasi maupun konvensional.				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan dan Kepariwisata
2	Mengembangkan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda	a. Pengembangan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda transportasi lokal				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Perhubungan dan Kepariwisata

4. PEMBANGUNAN FASILITAS PARIWISATA

Arah Kebijakan 1 : Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan DPK

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Mendorong dan meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pengembangan DPK	a. Penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Koperasi dan UMKM, Perdagangan, dan Lingkungan Hidup
		b. Kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata				
		c. Kemudahan mendapatkan kredit usaha melalui kebijakan penjaminan oleh pemerintah daerah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2	Meningkatkan fasilitasi Pemerintah Daerah untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pendukung pariwisata atas inisiatif swasta	a. Penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor, swasta dan masyarakat				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Lingkungan Hidup, Pertanahan, dan Pekerjaan Umum
		b. Pembukaan lahan baru bagi investor, swasta dan masyarakat untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				
3	Mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan destinasi pariwisata dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata	a. Penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan dan air bersih				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Pekerjaan Umum, Lingkungan Hidup, dan Kesehatan
		b. Penyediaan Pusat Informasi Pariwisata				
		c. Penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>)				
		d. Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam				
		e. Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan (<i>early warning system</i>)				
		f. Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah				
		g. Penyediaan fasilitas <i>money changer</i>				
		h. Penyediaan fasilitas khusus bagi				
		i. Penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia				
		j. Penyediaan fasilitas olah raga				
		k. Penyediaan fasilitas bermain anak-anak				
		l. Penyediaan fasilitas parkir yang memadai				
		m. Penyediaan fasilitas sanitasi dan sarana kebersihan				
		n. Penyediaan fasilitas telekomunikasi dan teknologi informasi				

Arah Kebijakan 2 : Pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta	a. Penyusunan regulasi untuk mengatur tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, dan Pekerjaan Umum
		b. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara Pemerintah Daerah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				
2	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan	a. Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola destinasi pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, dan Pekerjaan Umum
		b. Pemberian peran dan tanggung jawab kepada Pemerintah Desa, swasta dan masyarakat dalam pengelolaan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang				
3	Mengembangkan penerapan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus	a. Penyediaan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Pekerjaan Umum
		b. Evaluasi seluruh prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus				

Arah Kebijakan 3 : Pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Menyusun dan mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan	a. Penyusunan skema pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata dalam menjaga keberlanjutan daya dukung				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perijinan, Lingkungan Hidup dan Pekerjaan Umum
		b. Koordinasi perijinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu destinasi pariwisata				
2	Menegakkan peraturan perundang-undangan	a. Pencabutan ijin bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perijinan, dan Hukum
		b. Penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata				

5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN

Arah Kebijakan 1 : Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	a. Pemetaan potensi dan kebutuhan penguatan masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata,
		b. Perintisan pemberdayaan masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan				

		c. Pelatihan dan pendidikan kepariwisataan bagi masyarakat lokal				Pendidikan, dan Pemberdayaan Masyarakat
2	Menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	a. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat
		b. Peningkatan kapasitas organisasi desa dalam pengembangan kepariwisataan				
		c. Pelibatan organisasi masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan				

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Meningkatkan kapasitas, keterampilan dan produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata	a. Peningkatan kapasitas dan keterampilan pengelolaan usaha pariwisata yang dijalankan oleh masyarakat lokal di kawasan pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dan Pemberdayaan Masyarakat
		b. Fasilitasi pengembangan usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal				
		c. Pemberian modal usaha kecil menengah bagi masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata				
		d. Pelatihan dan pembinaan dalam pengembangan produk yang dikelola masyarakat lokal				
2	Mengembangkan regulasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal	a. Peningkatan kapasitas organisasi masyarakat/desa wisata dalam pengembangan usaha ekonomi di bidang pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perdagangan, dan Pemberdayaan masyarakat
		b. Peningkatan keterlibatan organisasi masyarakat /desa wisata dalam pengembangan usaha ekonomi di bidang pariwisata				

Arah Kebijakan 3 : Penguatan kemitraan antar usaha di bidang kepariwisataan

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Mendorong kemitraan antar usaha pariwisata dengan industri kecil dan menengah dan usaha mikro, kecil dan menengah	a. Penyusunan skema kemitraan antar berbagai jenis dan skala usaha di bidang pariwisata dalam menggerakkan usaha pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perdagangan, Lingkungan Hidup, dan Pemberdayaan Masyarakat
		b. Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) untuk mendorong usaha pariwisata skala UMKM				
2	Meningkatkan kualitas produk industri kecil dan menengah dan layanan jasa pariwisata yang dikembangkan usaha mikro, kecil dan menengah	a. Fasilitasi peningkatan kualitas produk dan layanan usaha untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan antar usaha				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, dan Pemberdayaan Masyarakat
		b. Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas produk dan layanan usaha untuk penguatan daya saing produk lokal				

Arah Kebijakan 4 : Peningkatan kesadaran masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan	a. Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di DPK				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Pemberdayaan
		b. Peningkatan peran kelompok sadar wisata) dalam pengembangan kepariwisataan				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
						Masyarakat
2	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata	a. Peningkatan kegiatan aksi sapta pesona di sekitar destinasi pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat
		b. Peningkatan kualitas kesehatan di seluruh mata rantai kegiatan kepariwisataan				
		c. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman				
		d. Peningkatan dan penguatan unsur kenangan khas di destinasi pariwisata				
3	Meningkatkan peran masyarakat dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan	a. Penguatan struktur dan peningkatan peran aktif polisi pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Keamanan dan Bencana
		b. Peningkatan peran masyarakat dan polisi pariwisata dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kegiatan pariwisata (gangguan keamanan, gangguan ketertiban dan bencana)				

6. PENGEMBANGAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

Arah Kebijakan 1 : Peningkatan insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Memberikan keringanan pajak untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor	a. Penetapan keringanan pajak dalam periode tertentu bagi pengembangan investasi				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	pariwisata	b. Menurunkan tarif pajak daerah yang menyebabkan kenaikan harga barang/jasa				bidang Kepariwisata dan Perpajakan
2	Memperbaiki jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor pariwisata	a. Kemudahan pengurusan visa bagi Penanaman Modal Asing				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perijinan dan Transmigrasi
		b. Perbaikan jasa pelayanan untuk meningkatkan kesadaran Penanaman Modal Asing akan pentingnya pembayaran pajak				
		c. Pembuatan aturan yang jelas terkait Penanaman Modal Asing				
3	Memberikan dukungan melalui respon positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat	a. Memelihara keamanan lingkungan				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Lingkungan Hidup, dan Perpajakan
		b. Pelibatan masyarakat dalam realisasi kegiatan investasi				

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Melaksanakan debirokratisasi investasi di bidang pariwisata	a. Pengembangan sistem dan mekanisme perizinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Perijinan
		b. Penyediaan kemudahan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata				
2	Melaksanakan deregulasi peraturan	a. Penyesuaian dan kemudahan urusan kontrak kerja				Organisasi Perangkat

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	yang menghambat perizinan	b. Pengurangan jenis peraturan investasi di bidang pariwisata				Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Perijinan

Arah Kebijakan 3 : Peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Menyediakan informasi peluang investasi di bidang pariwisata	a. Penyediaan informasi profil investasi di bidang pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Pelayanan dan Perijinan
2	Meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri	a. Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Pelayanan dan Perijinan
		b. Pengembangan berbagai <i>marketing kit</i> investasi				
		c. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan				
		d. Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet dalam dan luar negeri				
		e. Peningkatan <i>Road show</i> promosi investasi sektor pariwisata ke daerah-daerah dan negara-negara potensial				

Bagian - B : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA KABUPATEN

Arah Kebijakan 1 : Pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DPK	a. Intensifikasi program promosi dan pemasaran bagi DPK yang belum dikenal				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Hubungan Masyarakat
		b. Pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial dalam promosi dan pemasaran DPK				
2	Meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi untuk mendorong jumlah kunjungan wisatawan	a. Intensifikasi promosi dan pemasaran berbasis segmen dan karakteristik wisatawan				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Hubungan Masyarakat
		b. Peningkatan dan pengembangan media dalam promosi pariwisata				
3	Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan	a. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis pertemuan komunitas. Misalnya: Pertemuan Keluarga, Pertemuan Alumni Sekolah, dll				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Hubungan Masyarakat dan Lingkungan Hidup
		b. Intensifikasi program promosi dan pemasaran pada segmen remaja dan anak-anak untuk mengenal alam dan pelestarian lingkungan				
4	Mengintensifikasi pemasaran wisata MICE yang diselenggarakan oleh sektor lain	a. Intensifikasi kegiatan pemasaran MICE kepada perhimpunan profesi				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Kerjasama pemasaran MICE dengan organisasi pariwisata				

Arah Kebijakan 2 : Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata Kabupaten Lumajang secara berkelanjutan

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Meningkatkan citra pariwisata Kabupaten di antara para pesaing	a. Penajaman <i>positioning</i> pariwisata Kabupaten Lumajang				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Hubungan Masyarakat
		b. Peningkatan citra pariwisata berdasarkan pada kekuatan potensi				
		c. Pelaksanaan pemasaran dan promosi yang bermuara pada <i>brand image</i> yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan				
2	Mengembangkan dan memantapkan <i>positioning</i>	a. Pembuatan <i>branding</i> yang mencitrakan pariwisata Kabupaten Lumajang				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Hubungan Masyarakat
		b. Penggalan potensi pariwisata dengan memperhatikan aspek daya tarik wisata yang dominan				
		c. Pengembangan pemasaran pariwisata berbasis pada alam				
		d. Pengembangan sosial media dalam menyebarkan <i>brand image</i> Kabupaten Lumajang				
3	Mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen	a. Penerapan aturan apa yang boleh dikerjakan dan tidak boleh dikerjakan oleh wisatawan				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kesehatan, dan Hukum
		b. Penerapan harga yang standar dalam melindungi hak-hak konsumen				
		c. Pemberian asuransi kepada wisatawan yang mengalami kecelakaan di destinasi pariwisata				

Arah Kebijakan 3 : Peningkatan citra pariwisata Kabupaten Lumajang sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, berdaya saing dan berkelanjutan

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Meningkatkan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra positif	a. <i>Public Relation-ing</i> (PR-ing) yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	pariwisata Kabupaten	b. Pengadaan <i>Tourism Information Center</i>				bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Hubungan Masyarakat
		c. Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran (media <i>on-line</i> dan <i>off-line</i>)				
		d. Peningkatan kualitas website pariwisata Kabupaten Lumajang				
		e. Pengembangan Kabupaten Lumajang <i>tourism cyber campaign</i> , melalui: - <i>E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools</i> , dan lain-lain. - <i>Social networking machines (facebook, twitter, youtube</i> , dan lain-lain). - <i>On-line events (contest, blogging events</i> , dan lain-lain).				
		f. Pengembangan <i>linkage</i> jaringan <i>e-marketing</i> pariwisata				

Arah Kebijakan 4 : pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis dan berkelanjutan

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Kabupaten	a. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program promosi dalam pengembangan investasi				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Hubungan Masyarakat
		b. Penguatan promosi bermitra dengan pelaku usaha pariwisata				
		c. Pengembangan kemitraan promosi dengan organisasi pariwisata				
		d. Fasilitasi penjualan secara langsung kepada wisatawan				
2	Mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan	a. Pengembangan standard pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di
		b. Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	menempatkan masyarakat sebagai tuan rumah dan penerima manfaat				bidang Kepariwisata dan Hubungan Masyarakat
		c. Pengembangan media pemasaran yang ramah lingkungan				
		d. Penerapan pola insentif bagi usaha pariwisata yang melakukan pemasaran pariwisata yang bertanggung jawab				

Arah Kebijakan 5 : Pengembangan promosi destinasi tematik

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	a. Peningkatan program promosi berbasis tema tertentu secara terencana dengan pengembangan produk sesuai tema. Misalnya: <i>Tahun Kunjungan Wisata Budaya</i> , dll				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Hubungan Masyarakat
		b. Pelaksanaan program promosi bertema khusus				
		c. Pembuatan bahan promosi secara tematik				

Bagian - C : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KABUPATEN

Arah Kebijakan 1 : Penguatan fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Meningkatkan sinergitas dan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata	a. Pembentukan forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Penyusunan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan dan memasarkan produk pariwisata				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB dan Perdagangan
			I	II	III	
2	Menguatkan fungsi, hierarki, dan hubungan antar usaha Pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing	a. Penyusunan skema kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan dan Perdagangan
		b. Pembuatan dan pengembangan informasi digital terkait produk pariwisata				
3	Menfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata	a. Fasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan dan Perdagangan
		b. Pemberian bantuan dana operasional bagi organisasi industri pariwisata				
		c. Penyusunan tata kelola organisasi industri pariwisata				

Arah Kebijakan 2 : Pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Menguatkan kualitas produk pariwisata	a. Pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan, Koperasi dan UMKM, dan Perdagangan
		b. Pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata				
		c. Penggunaan unsur kelokalan dalam produk pariwisata				
2	Meningkatkan pengemasan produk wisata	a. Peningkatan kualitas pengemasan produk wisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisataan, Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Pemberdayaan
		b. Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan produk pariwisata				

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
						Masyarakat
3	Menciptakan iklim usaha yang kondusif	a. Perlindungan bagi industri/usaha kreatif				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Koperasi dan UMKM, Perdagangan dan Pelayanan
		b. Pendaftaran usaha pariwisata satu atap				
		c. Penggunaan mata uang rupiah dalam setiap transaksi				

Arah Kebijakan 3 : Pengembangan kualitas fungsi dan layanan fasilitas pariwisata yang memenuhi standar dan mengangkat unsur keunikan dan kekhasan lokal

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Memfasilitasi dan meningkatkan standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata	a. Bantuan untuk standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Koperasi dan UMKM, dan Perdagangan
		b. Evaluasi standarisasi dan serifikasi usaha pariwisata yang telah diberikan pada usaha pariwisata secara berkala				
2	Memberikan insentif untuk menggunakan produk yang memiliki keunikan dan kekhasan lokal	a. Bantuan dana produksi bagi usaha pariwisata yang menggunakan unsur kelokalan				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Koperasi dan UMKM, dan Perdagangan
		b. Pemanfaatan unsur dan tema kelokalan dalam usaha pariwisata				

Arah Kebijakan 4 : Pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung perjalanan wisatawan ke DPK

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Mendorong pengembangan usaha transportasi pariwisata yang nyaman dan aman	a. Mempermudah perijinan pendirian usaha transportasi pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perhubungan dan Perijinan
		b. Pelatihan pengelolaan transportasi				
		c. Penerapan standarisasi pelayanan transportasi pariwisata				
2	Meningkatkan etika bisnis dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata	a. Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Perhubungan dan Pemberdayaan Masyarakat
		b. Peningkatan dan implementasi standar kelayakan operasional usaha transportasi pariwisata				

Arah Kebijakan 5 : Pengembangan skema kerja sama lintas sektoral yang dapat mendukung pengembangan usaha pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Menguatkan kerjasama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat	a. Pembuatan skema kerjasama perencanaan antara Pemerintah Daerah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi dan produk pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kebencanaan, Koperasi dan UMKM, dan Perdagangan
		b. Peningkatan kerjasama perencanaan dalam meningkatkan Sadar Wisata melalui Sapta Pesona				
		c. Pelaksanaan kerjasama perencanaan dalam pemulihan destinasi pariwisata pasca bencana, gangguan keamanan dan keselamatan				
2	Mengembangkan pola-pola kerjasama	a. Penyerapan bahan lokal (<i>local content</i>) dalam usaha				Organisasi Perangkat

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	industri lintas sektor	pariwisata b. Penggunaan sumber daya lokal (SDM dan sumber daya lainnya) dalam penyelenggaraan usaha pariwisata				Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Pemberdayaan Masyarakat, dan Perdagangan
3	Mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam mendukung usaha pariwisata	a. Fasilitasi pengembangan UMKM di bidang pariwisata b. Penerapan pola bapak angkat dalam pengembangan UMKM pariwisata c. Pengembangan jejaring pemasaran untuk produk UMKM				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Pemberdayaan Masyarakat, Koperasi dan UMKM, dan Perdagangan

Arah Kebijakan 6 : Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan kode etik pariwisata dunia

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya	a. Pengembangan pengelolaan usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya b. Implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk usaha-usaha pariwisata c. Penyaluran program CSR yang mendukung pengembangan destinasi pariwisata dan masyarakat				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat, dan Perdagangan

Bagian - D : ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN

Arah Kebijakan 1 : Reformasi dan restrukturisasi organisasi kepariwisataan di Kabupaten Lumajang

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Mereposisi urusan pariwisata di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang	a. Pengembangan fungsi Dinas Pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pemerintahan dan Kepariwisata
		b. Peningkatan anggaran pengembangan pariwisata				
		c. Peninjauan kembali terhadap pengembangan pariwisata				
2	Menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur SKPD	a. Penyesuaian organisasi internal SKPD Pariwisata dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan kepariwisataan.				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pemerintahan dan Kepariwisata
		b. Penguatan urusan kepariwisataan di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai peran strategis				

Arah Kebijakan 2 : Optimalisasi koordinasi antar SKPD

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Mengembangkan perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor	a. Pembentukan unit kerja yang berfungsi untuk mengkoordinasikan dan menggerakkan lintas sektoral dalam urusan pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Pemerintahan dan Kepariwisata
		b. Menjalani komunikasi secara insentif lintas sektor				
		c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan koordinasi lintas sektor				

Arah Kebijakan 3 : Optimalisasi organisasi kepariwisataan dalam mendukung usaha pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			INSTANSI PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Memfasilitasi Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Lumajang dalam mendukung pemasaran pariwisata	a. Pembentukan BPPK Lumajang				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata
		b. Pemberian bantuan (hibah) untuk operasionalisasi BPPK				
		c. Pengembangan mekanisme dan regulasi koordinasi kewenangan BPPK Lumajang dalam program promosi dan pemasaran pariwisata				
2	Menguatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan swasta dan Pemerintah Daerah	a. Pembentukan organisasi untuk pelaku pariwisata dalam membantu pembangunan kepariwisataan				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat
		b. Pelibatan swasta dan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan				
3	Menfasilitasi dan mengembangkan organisasi masyarakat di bidang pariwisata	a. Fasilitasi peran organisasi masyarakat di bidang pariwisata (Pokdarwis dan Desa Wisata)				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat
		b. Membantu pendanaan dalam pengelolaan, pembinaan dan operasionalisasi organisasi melalui program CSR perusahaan				

Arah Kebijakan 4 : Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB TERKAIT
			I	II	III	
1	Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas pegawai	a. Diklat dalam perencanaan strategik (<i>strategic planning</i>) bidang kepariwisataan				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB TERKAIT
			I	II	III	
		b. Pendidikan formal atau non formal dalam: <ul style="list-style-type: none"> - peningkatan kecakapan manajerial dan teknis bidang kepariwisataan - Pengembangan kemampuan interaksi sosial (<i>soft skills</i>) seperti negosiasi, diplomasi, dan kemampuan komunikasi (<i>public speaking</i>) - Pelatihan promosi dan pemasaran. 				bidang Kepariwisata, Kepegawaian dan Ketenagakerjaan
		c. Magang dalam peningkatan keterampilan manajerial di bidang kepariwisataan				
		d. Pelaksanaan standar kompetensi SDM pengelola <i>e-government</i> kepariwisataan				
2	Meningkatkan kualitas pegawai di bidang kepariwisataan	a. Fasilitasi pendidikan lanjutan di bidang kepariwisataan bagi pegawai yang bekerja di bidang kepariwisataan				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Kepegawaian dan Ketenagakerjaan
		b. Pelibatan pegawai di lembaga-lembaga pelatihan, kajian dan penelitian kepariwisataan				
3	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengelola pendidikan dan latihan bidang kepariwisataan	a. Magang di lembaga pendidikan kepariwisataan				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Pendidikan, Kepegawaian dan Ketenagakerjaan
		b. Pelatihan dengan mendatangkan <i>Technical Expert</i> dari lembaga pariwisata ternama				

Arah Kebijakan 5 : Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata

Arah kebijakan ini dijabarkan dalam bentuk strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	INDIKASI PROGRAM	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB TERKAIT
			I	II	III	
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di bidang pariwisata	a. Pemetaan jenis kompetensi faktual dan prospektif bagi SDM industri pariwisata				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Ketenagakerjaan
		b. Pelibatan dan implementasi sertifikasi profesi SDM industri pariwisata				
		c. Pemberian bantuan biaya sertifikasi profesi				
2	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan di bidang kepariwisataan	a. Pelatihan perancangan bisnis bagi UMKM pariwisata.				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata, Koperasi dan UMKM, dan Perdagangan
		b. Advokasi dan pendampingan pelaksanaan bisnis bagi UMKM pariwisata				
3	Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan di bidang kepariwisataan	a. Fasilitasi pendirian sekolah kepariwisataan yang dilengkapi dengan sarana prasarana yang berkualitas				Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab di bidang Kepariwisata dan Pendidikan
		b. Penerapan kurikulum dan metode pembelajaran yang baik				

Plt. BUPATI LUMAJANG

ttd.

dr. BUNTARAN SUPRIANTO. M. Kes.